

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang melanda dunia semakin memperluas perdagangan internasional, dengan aturan-aturan yang semakin memperlebar kesenjangan. Disatu sisi, negara-negara kaya menekan negara-negara berkembang dengan lewat berbagai cara, terutama bantuan keuangan, untuk membuka pasar bagi mereka, tetapi di sisi lain negara-negara kaya masih mempraktekan kebijakan dagang yang cenderung proteksionis.

Perkembangan yang terjadi sejauh ini menunjukkan mobilitas produksi barang dan jasa telah merambah keseluruhan penjuru dunia lewat perdagangan internasional. Pada awalnya, perdagangan merupakan sebuah cara berelasi antar dua pihak untuk memenuhi tujuannya. Keduanya merasa senang dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Perdagangan digunakan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tetapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah kenyataan bahwa perdagangan selalu memiliki sisi positif dan negatif. Secara positif, perdagangan bagi sebuah negara (terutama dengan negara lain) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan negara, yang kelak akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan di dalam negeri dan secara tidak langsung akan membantu meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Perdagangan juga dapat menjadi stimulus bagi

kehidupan sektor-sektor ekonomi yang lain seperti pertanian, industri dan bahkan teknologi.

Perdagangan mempunyai potensi untuk memberantas kemiskinan. Namun kenyataannya justru perdaganganlah yang selama ini memperlebar kesenjangan yang telah ada antara kaum miskin dan kaya. Kemakmuran sekelompok kecil warga bumi dihadapkan dengan kemiskinan massal yang menimpa sebagian besar warga lainnya. Kenyataan yang tidak terbantahkan ini bukan disebabkan oleh perdagangan itu sendiri, tetapi lebih pada aturan-aturan dagang yang tidak *fair* yang lebih penting memihak kepentingan pihak tertentu, terutama pihak yang kaya.

Situasi perdagangan tersebut tentu saja dialami oleh produsen kecil (nelayan, petani, buruh, perajin) di Indonesia. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tawar-menawar dan melawan sistem yang ada. Sebuah sistem yang tidak adil (karena hanya menguntungkan sekelompok kecil orang), sekaligus eksploitatif. Sistem ini justru semakin dikukuhkan dengan berbagai peraturan dan produk legislasi lainnya, baik yang dibuat oleh pemerintah (eksekutif) maupun lembaga legislatif.

Perdagangan jika tidak dikelola dengan baik dan diikuti oleh peraturan yang tidak adil maka perdagangan dapat menghancurkan kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Perdagangan menyebabkan orang tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Pengusaha semakin berambisi untuk memperoleh akumulasi modal mereka dengan berbagai cara dan pengorbanan yang seminimal mungkin, dan bahkan jika perlu melakukan praktek bisnis

yang curang. Bukan hal yang aneh jika pengusaha bermodal besar melakukan "kerjasama" dengan kaum birokrat untuk melindungi sekaligus memperbesar usaha bisnis mereka. Akibatnya produsen kecil semakin terjepit. Terjadi eksploitasi dalam hampir semua aspek kehidupan.

Ketimpangan perdagangan yang selama ini berlangsung, melemahkan posisi produsen-produsen kecil. Keberpihakan kepada pemilik modal, sering melandasi terbitnya kebijakan-kebijakan yang ada, tidak saja di negara-negara maju, tetapi juga melanda di negara-negara berkembang. Oleh sebab itu menjadi penting mengembangkan alat-alat pasar yang mampu melindungi produsen kecil.

Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu motor lokomotif yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di Dunia. Peran usaha kecil Menengah di Indonesia diakui sangat penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam aspek-aspek, seperti peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapat, pembanguan ekonomi pedesaan dan peningkatan ekspor non-migas.

Usaha kecil dan menengah di Indonesia merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang terbukti tangguh dalam menghadapi krisis, sehingga perlu terus dikembangkan dan diberdayakan. Bagi Usaha kecil dan menengah, kemampuan untuk memberikan tanggapan yang tepat dan cepat pada setiap tantangan, merupakan kunci keberhasilan dalam persaingan. Kemampuan tersebut berkaitan erat dengan kompetensi praktis Usaha kecil dan menengah dalam bidang pemberdayaan sumber daya manusia.

Pemerintah Indonesia telah menyadari keadaan ini, terbukti dengan adanya kebijaksanaan dan konsep yang diluncurkan oleh pemerintah demi membantu dan mendorong perkembangan usaha kecil menengah. Mula-mula pemerintah menggalakkan program Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan kemudian program-program tersebut sejak tahun 1991 yang lalu telah diubah menjadi Kredit Usaha Kecil (KUK) yaitu program yang mengharuskan perbankan menyisihkan 20% dari pagu kreditnya untuk KUK. Adapula kebijaksanaan pemerintah yang mengharuskan BUMN menyisihkan sekitar 1-5% keuntungan kepada usaha kecil. Disamping itu, sejak tahun 1980-an, pemerintah juga menerapkan konsep kemitraan antara pengusaha besar sebagai bapak angkat dan usaha kecil menengah sebagai anak angkat¹.

Dalam prakteknya program-program tersebut belum menampakkan hasil yang diharapkan. Semua kebijaksanaan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut, dirasa belum mencukupi didalam usaha membina dan mendukung pengembangan Usaha Kecil Menengah karena permasalahan yang dihadapi usaha kecil menengah tidak hanya terletak pada keterbatasan modal, namun lebih dari itu. Bila keadaan ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan kesenjangan dan daya saing antara pengusaha kecil/menengah dengan pengusaha besar akan semakin melebar.

Menghadapi kondisi yang demikian, muncul sebuah gerakan perdagangan yang adil atau yang lebih dikenal dengan *Fair Trade*. Gerakan

¹ Untan<http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=140911>

ini bertujuan memberdayakan para produsen marjinal dari negara-negara berkembang agar mereka dapat mengembangkan usahanya dan memperbaiki kualitas hidupnya. *Fair trade* adalah sebuah bentuk kemitraan yang didasarkan pada dialog, transparansi dan perhatian, untuk menciptakan keadilan yang lebih besar dalam perdagangan.²

Gerakan *Fair Trade* sesungguhnya muncul dari kurang lebih empatpuluh tahun yang lalu sebagai gerakan yang dilandasi semangat solidaritas dunia barat terhadap negara dunia ketiga, untuk membantu kaum miskin dan yang berkembang. Inisiatif ini terus berkembang, bahkan konsep dasarnya mengalami pergeseran. Tak hanya sebagai donasi, ketika sebagian kecil masyarakat dunia barat menilai telah terjadi eksploitasi harga dalam perdagangan antara negara mereka dan negara dunia ketiga, mereka ingin memperbaikinya dengan memberi harga lebih adil.

Sekitar tahun 1970-an, sejumlah petani kopi skala kecil di Meksiko yang sangat bergantung pada pihak lain (pengumpul, pedagang, dan pengolah) dalam rantai perdagangan kopi mengembangkan label/sertifikasi *fair trade* untuk kopi mereka. Nama yang diberikan adalah Max Havelaar. Dalam percobaan awal ini, dibuka hubungan langsung antara pengolah kopi dan pengecer di Belanda dengan koperasi petani kopi di Meksiko. Kini selain sebagai sebuah gerakan, *fair trade* populer sebagai label/sertifikat yang disematkan pada produk yang dijual. Ini menjadi semacam jaminan dan transparansi lebih bagi konsumen bahwa produsen skala kecil mendapatkan

² Savio W. 2003. *Fair Trade sebuah Alternatif positif*. Surakarta. Yayasan Samadi. hal: 5.

harga yang adil. Dari sisi produsen, sertifikasi memperbesar akses mereka terhadap pasar ekspor.

Gerakan *Fair Trade* di populerkan oleh organisasi non pemerintah seperti Oxfam Inggris, *fair trade* Amerika Serikat, dan *Trans Fair* Jerman. Gerakan *Fair Trade* ini juga didukung oleh organisasi *independen* seperti FLO (*Fair Trade Labelling Organisation*) yang didirikan Belanda pada Bulan April 1997, IFAT (*International Federation for Alternative Trade*) yang didirikan di Noorderwijk Belanda pada tanggal 12 Mei 1989, NEWS (*Network of European World Shops*) yang didirikan di Eindhoven Belanda pada Februari 1994 bersama dengan *European World Shops Conference*, peringatan ulang tahun ke 25 berdirinya *Landelijke Vereniging Van Wereldlinkers* (Asosiasi *World Shops* Nasional Belanda). Kemudian EFTA (*European Fair Trade Association*) yang berasal Maastricht-Belanda dan didirikan di Belanda tahun 1990. Dari beberapa yang mendukung gerakan ini akhirnya sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang bernama FINE yang didirikan pada bulan November tahun 2001. Nama organisasi besar di ambil dari nama depan FLO, IFAT, NEWS, dan EFTA.

Selain membuka toko *Fair Trade* sebagai pendapatan utama, Oxfam juga memberikan pelatihan peningkatan pelatihan, konsultasi, manajemen dan bantuan modal bagi penembangan usaha kepada pengusaha kecil dan perajin. Pada dekade 1980-an Oxfam memperkenalkan sistem penjualan melalui post, dimana konsumen hanya menunjukkan jenis barang yang dibeli dalam katalog yang sudah disiapkan untuk konsumen. Konsumen dalam hal ini hanya

menunjukkan nomor kartu kredit dan alamatnya maka konsumen hanya menunggu pengiriman barang melalui post. Sistem ini mampu mendobrak *volume* penjualan barang-barang Oxfam hingga ke angka satu juta *poundsterling* pertahunnya.

Perkembangan *Fair Trade* di Indonesia, tidak lepas dari peran Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM). Dalam hal ini *fair trade* sebagai sarana untuk membentuk kelompok-kelompok yang memajukan ekonomui rakyat miskin. Dengan kata lain LSM-lah yang menjadi penggerak dari *fair trade* tersebut. Dalam hal ini LSM memfasilitasi atau bergerak sebagai importir terhadap produk para produsen kecil. Produk para produsen kecil tersebut kemudian disalurkan ke kancah perdagangan internasional.

Gerakan *fair trade* di Indonesia di upayakan untuk kelompok lokal dapat mandiri dengan usaha mereka melalui pelatihan, serta pemberian modal, benih atau peralatan yang dibutuhkan. Berikut ini adalah beberapa LSM yang bergerak di jalur perdagangan *fair trade*. LSM yang menjadi pelopor pertama di Indonesia antara lain: Yayasan Mitra Bumi Indonesia (MBI-Malang), dalam memperjuangkan kaum petani yang mampu melahirkan produk pertanian organik. Yayasan Samadi Solo yang memperjuangkan produk batik garmen, Yayasan Mitra Bali, Yayasan Pekerti Yogyakarta dan Yayasan Pekerti Yogyakarta yang mengembangkan produk kerajinan tangan menggunakan jalur perdagangan *fair trade*.

Yayasan Pekerti adalah salah satu organisasi sosial masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat pengrajin antara lain di bidang

pemasaran produk kerajinan, yang memprioritaskan pada kerja sama dengan komunitas yang ada dalam target wilayah tertentu, perajin yang memiliki pemasukan rendah yang ada di desa dan kota dan yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan sebagai sebuah kelompok kerajinan, pengrajin tangan kecil yang saat ini sudah jarang karena perdagangan yang tidak adil dan yang tidak memiliki akses dana, UKM, Organisasi non pemerintah dan Yayasan lokal lainnya, yang memiliki potensi untuk membantu pengembangan pengusaha dan pengrajin kecil.

Kehadiran Yayasan Pekerti di Yogyakarta khususnya Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul membantu memberikan dorongan kepada para perajin yang terkena dampak gempa bumi agar kembali menjalankan usahanya. Peristiwa gempa bumi yang melanda Yogyakarta setahun lalu ini, masih meninggalkan rasa trauma berkepanjangan bagi korban gempa. Namun secara umum telah ada perubahan positif yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Hal ini ditandai dengan telah aktifnya sebagian masyarakat korban gempa dalam membuka usaha, baik usaha lama maupun usaha baru. Pada sisi yang lain, aktifnya sektor ekonomi disebabkan karena banyaknya program-program bantuan yang berasal dari lembaga-lembaga non-pemerintah yang memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi korban bencana. Program pemberdayaan ekonomi memiliki nilai yang sangat strategis dan berkesinambungan karena memiliki visi ke depan bagi terciptanya kembali kemandirian masyarakat.

Pundong merupakan salah satu sentra kerajinan keramik di Yogyakarta yang terkena dampak gempa bumi cukup parah. Akibat gempa bumi tersebut, banyak para perajin keramik di wilayah ini yang kehilangan keluarga, harta benda serta tempat tinggal, juga hancurnya peralatan produksi seperti tungku, serta terputusnya atau tertundanya rantai order yang telah mereka peroleh sebelumnya.

Keunikan perajin di Kecamatan Pundong adalah keahlian yang diperoleh secara turun temurun dan para perajin tradisional yang tinggal di sebuah dusun/desa biasanya memiliki keahlian memproduksi karya kerajinan yang sejenis. Dengan banyaknya warga yang bergelut di kerajinan yang sejenis, dalam perkembangannya desa tersebut menjadi pusat atau sentra suatu produk kerajinan. Para *buyer* dan pecinta karya seni tradisional selain bisa memilih berbagai alternatif produk dari perajin yang berbeda sekaligus berwisata menikmati alam atau keunikan desa setempat dan juga bisa melihat proses pembuatan sebuah karya kerajinan³.

Berdasarkan dari uraian di atas, Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki kemampuan untuk menjadi pilar penting bagi perekonomian masyarakat dalam menghadapi terpaan krisis ekonomi. Untuk mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM) agar terus berkembang dalam melakukan usahanya Yayasan Pekerti menerapkan alternatif perdagangan yaitu gerakan perdagangan *Fair Trade*

³<http://www.Bantulbiz.com>: *Bantul Crafts - Investment - Business Portal*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ilmiah ini adalah:

1. Apa wujud program Yayasan Pekerti dalam pemberdayaan perajin *handicraft*.
2. Apa program Yayasan Pekerti yang sudah sesuai dengan konsep *fair trade*?

C. Tujuan Penulisan Ilmiah

1. Mengetahui Apa wujud program Yayasan Pekerti dalam pemberdayaan perajin *handicraft*.
2. Mengetahui program *fair trade* yang sudah sesuai dengan konsep *fair trade*?

D. Kerangka Konseptual

Dalam menelaah permasalahan yang ada, tidak hanya diatasi dengan pemikiran atau penalaran saja, tetapi harus dilandasi dengan teori sehingga dapat terwujud dengan baik suatu karya ilmiah yang diharapkan. Selain itu kerangka teori bertujuan sebagai alat analisis yang memberikan landasan bagi penulis untuk mengurai permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah.

1. Konsep LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

a. Pengertian LSM

Studi tentang LSM merupakan suatu fenomena baru dalam ranah sistem politik Indonesia. Istilah LSM ini sendiri merupakan bentuk dari

adaptasi Bahasa Inggris *Non Governmental Organisations* (NGOs). Edward dan Humme mendefinisikan istilah NGOs sebagai kategori organisasi yang batasannya sangat luas terjadi dari lembaga yang beragam. Mereka mencoba mendefinisikan batasan NGOs dilihat dari bentuk, ukuran dan fungsinya yang dibedakan menjadi 3 tipe yakni:

NGOs internasional seperti *Save the Children Aid* (biasanya disebut sebagai “Northern NGOs” atau “NNGOs”); LSM “perantara” di selatan (NGOs, selatan) yakni mereka yang mendukung kerja kelompok akar rumput (*grassroots*) melalui pendanaan, nasihat teknis dan advokasi; gerakan akar rumput dari jenis yang beragam (organisasi akar rumput atau GROs, dan organisasi yang berbasis komunitas atau CBOs) yang dikendalikan oleh anggotanya sendiri; serta jaringan kerja maupun federasi yang terdiri atas beberapa atau seluruh tipe LSM di atas.⁴

b. Tipologi Lembaga Swadaya Masyarakat

David Koerten melakukan generalisasi LSM berdasar strategi program pembangunan, yang ada 3 tipe generasi LSM. Generasi pertama disebut kelompok generasi bantuan dan kesejahteraan seperti *Save the Children*, *CARE*, *Catholic Relief Service* dan *World Vision* yang memberikan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat miskin seluruh dunia. Generasi kedua disebut lokal skala kecil dan swadaya yang merupakan reaksi atas LSM generasi pertama. Seringkali kegiatan LSM

⁴ Fakih, Mansour. (2004). Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

tipe kedua ini paralel dengan pemerintah tetapi didasarkan pada landasan layanan pemerintah tidak sampai ke desa-desa. Generasi ketiga disebut pembangunan berkelanjutan yang mulai meninjau isu dasar berkaitan dengan konsep berkelanjutan, luasnya dampak dan pemulihan biaya yang berulang

Koerten tidak memandang perlu pentingnya paradigma pembangunan alternatif. Perhatiannya tertuju pada fungsi manajemen dan metodologi dinamika aktifis LSM dalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari masyarakat bawah.

Tabel 1.1.

Table Peta Paradigma Lembaga Swadaya Masyarakat

	Konformisme	Reformisme	Transformasi
Sebab masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Keadaan rakyat - Takdir Tuhan - Nasib buruk 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Eksploitasi - Struktur yang timpang - Hegemoni kapitalis
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi Penderitaan - Mendoakan - Mengharapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Produksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menentang Eksploitasi - Membangun Struktur prekonomian/politik baru - Kontra <i>diskursus</i>
Program	<ul style="list-style-type: none"> - Perawatan anak - Bantuan Kelaparan - Klinik - Rumah panti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan teknis - Pengembangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Ekonomi alternative - Serikat buruh - Koperasi penyadaran
Tipe Perubahan dan Asumsi	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Keseimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kritik struktural
Tipe Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Percaya pada pemerintah - Konsultatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipatif - Terbuka - Memikul tanggung jawab bersama 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitator partisipatif - Disiplin yang kuat

Tipe pelayanan	- Memberi derma - Kesejahteraan	- Membantu rakyat untuk mendorong diri sendiri - Revolusi Hijau - Pembangunan komunitas - Pendidikan non formal - Pendidikan kejuruan	- <i>Land Reform</i> - Riset partisipatif - <i>Popular education</i>
Inspirasi	- Konfirmasi	- Reformasi	- Emansipasi - Transformasi

Sumber: Fakhri, Mansour. (2004). Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dari pemetaan paradigma LSM tadi *Hope and Timmel* memetakan posisi politis aktifis LSM menjadi topologi tipe lipatan sebagai berikut

1. Perspektif *Konformisme*

Tipe pertama terdiri atas aktifis LSM yang melakukan pekerjaan mereka berdasarkan kepada paradigma bantuan karitatif, atau sering disebut “bekerja tanpa teori” atau mereka yang berorientasi pada proyek dan bekerja organisasi yang menyesuaikan diri dengan sistem dan struktur yang ada. Pada dasarnya, motivasi utama bagi program dan aktifitas mereka adalah menolong rakyat dan didasarkan pada niat baik untuk membantu mereka yang membutuhkan.

2. Perspektif *Reformis*

Kategori kedua ini didasarkan pada ideology modernisasi dan *developmentalisme*, dimana sekitar 80% mayoritas aktifis LSM mengikuti paradigma reformis ini. Hal yang menjadi tema utama paradigma ini menekankan pada partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Dengan menempatkan isu-isu korupsi di pemerintah

sebagai sebab utama dari keterbelakangan masyarakat. Mereka lebih memperhatikan pada aspek pendekatan dan metodologi dalam gerakannya serta mendukung *developmentalisme*. Tujuan utama pandangan ini adalah merubah pendekatan atas ke bawah dan bersikap non partisipatif kearah pendekatan yang lebih menekankan pada partisipasi dan swadaya masyarakat.

3. Perspektif *Trasformative*

Tipe ini merupakan alternatif terhadap 2 pendekatan terdahulu. Salah satu perspektif ini adalah mempertanyakan paradigma *mainstream* dan *ideology* yang tersembunyi di dalamnya serta berusaha menemukan paradigma alternatif yang akan mengubah struktur dan supra struktur yang menindas rakyat dan kemungkinan membuka potensi kemanusiaanya. Paradigma ini memungkinkan bagi rakyat untuk mengontrol produksi informasi dan ideologi mereka sendiri. Pendekatan ini biasanya ditemukan pada kalangan LSM yang bekerja pada isu-isu lingkungan. Semangat kontra hegemoni kapitalis dengan jelas ditunjukkan oleh LSM ini melalui Koran dan majalahnya. Hal tersebut diterjemahkan lewat aksi dalam program kampanye dan advokasi mereka membela dan mendukung petani miskin, rakyat pribumi dan kelompok termarginalkan mereka

Berdasarkan pemetaan tipologi LSM di atas Yayasan pekerti berada pada tipe kedua yaitu perspektif *reformis*, yaitu memperbaiki kesejahteraan para pengrajin melalui program penguatan, penciptaan

lingkungan yang mendukung ekonomi dan perdagangan yang adil melalui pendidikan dan jaringan, memperkuat profesionalisme dalam lembaga, jaringan kerjanya, dan kelompok pengrajin, untuk berpartisipasi dalam mencapai demokrasi ekonomi dan perdagangan yang adil (*fair trade*).

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat berkemampuan lemah yang dilakukan secara sengaja dan terukur. Artinya, terdapat strategi, mekanisme, dan tahapan yang disusun secara sistematis untuk memberdayakan kelompok masyarakat berkemampuan lemah dalam jangka waktu tertentu.

Pemberdayaan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai – nilai sosial, berpusat pada peran serta aktif kelompok masyarakat miskin, agar masyarakat miskin semakin berdaya. Dalam pemberdayaan terdapat tiga upaya, yaitu:

1. Upaya pemberian kesempatan. Pemberdayaan dilakukan antara lain dengan langkah – langkah meningkatkan akses ke aset produksi, membangun prasarana penunjang, meningkatkan pendidikan, menciptakan tenaga kerja mandiri bagi kelompok angkatan kerja dan pemerataan pembangunan antar daerah.
2. Upaya pembelaan. Upaya tersebut memberikan pembelaan kepada masyarakat yang masih lemah dan berjalan terpadu dengan upaya pemberian kesempatan. Korten (1984) mengatakan bahwa tanpa upaya

pembelaan dengan cara melakukan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, masalah sosial ekonomi tidak akan dapat terselesaikan.

3. Upaya perlindungan. Di sini pemberdayaan adalah melindungi yang lemah. Hal ini terjadi karena ketidak seimbangan pemilikan aset produksi di masyarakat. Upaya perlindungan dapat dilakukan terhadap kelompok masyarakat lemah dengan memberikan perlindungan kepada pelaku kegiatan ekonomi yang bersifat mandiri.⁵

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara di mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki

⁵ Randy R. Wrihatnolo, & Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia, 2007), halaman 205-211.

kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan sebuah proses.

Untuk mewujudkan teori di atas maka masyarakat harus mengerti dimana arah dan tujuan tindakan mereka. Mengingat perubahan jaman sekarang ini sangat terasa mulai dari kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dalam pembuatan suatu kerajinan, hingga pemasaran hasil kerajinan mereka. Yang dibutuhkan perajin saat ini adalah bagaimana mereka bisa menciptakan suatu produk kerajinan yang kualitasnya tidak kalah dengan produk kerajina diperusahaan-perusahaan besar dan bagaimana menyalurkan hasil kerajinan itu ke pasar internasional. Dalam hal ini perajin harus memiliki asosiasi sukarela dan dukungan partisipasi oleh peraji itu sendiri dan partisipasi dari lembaga pendamping. Pembentukan asosiasi berkaitan dengan perdagangan alternatif *fair trade* melalui Yayasan Pekerti sebagai lembaga pendamping atau penggerak lebih cenderung melihat rodusen kecil dimasyarakat. Untuk mewujudkan alternatif perdagangan tersebut dibutuhkan partisipasi sebagai gerakan asosiasi sukarela.

Keit Davis dan John W. Nestrom (1995) partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam sistuasi kelompok

yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan itu⁶.

Ada tiga buah unsur penting yang dimaksud Keith Davis dan memerlukan perhatian khusus adalah:

1. Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota kelompok dengan segala nilainya.
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab.

Konsep partisipasi mempunyai metode yang berbeda-beda untuk meningkatkan atau memperkuat partisipasi itu sendiri. metode pengembangan partisipasi yang dilakukan oleh Yayasan Pekerti seperti pelatihan, pengembangan, dan penilain.

3. Konsep *Fair Trade*

a. Pengertian *Fair Trade*

Pengertian *Fair Trade* secara umum adalah perdagangan yang berkeadilan, secara mendalam *fair trade* adalah sebuah mekanisme kerjasama ekonomi yang berbasiskan dialog, transparansi dan

⁶Davis, Keith & John W. Newstrom. 1995. *Perilaku Dalam Organisasi*. Terjemahan. Jakarta : Erlangga. Hal. 179

penghargaan guna membangun keadilan yang lebih besar dalam perdagangan internasional.

Intinya *fair trade* merupakan sebuah gerakan global yang mencoba memberikan jaminan bahwa produsen di negara-negara miskin dan sedang berkembang dapat mendapatkan kontrak yang adil atau *fair deal* yang mencakup harga yang pantas bagi produk-produk mereka, kontrak pembelian jangka panjang, dan dukungan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, serta meningkatkan produktifitas⁷.

Model perdagangan *Fair Trade* pertama kali diterapkan oleh orang-orang di Amerika melalui institusi *Ten Thousand Vilagges* (dulunya Mennonite Central Committee Self Help Service) dan SERRV (sekarang SERRV Internasional) dengan komunitas masyarakat miskin di negara-negara selatan pada akhir tahun 1940-an ketika direktur Oxfam UK yang mengunjungi Hongkong, mempunyai ide untuk menjual kerajinan yang dibuat oleh para pengungsi Cina ke toko-toko Oxfam.

Pada tahun 1964 Oxfam mendirikan *Alternative Trading Organisation* (ATO) yang pertama. Inisiatif serupa terjadi di Belanda pada tahun 1967 dengan organisasinya bernama organisasi S.O.S Wereldhandel, yang sekarang terkenal sebagai Fair Trade Organisatie. Sejak tahun 1970-an, toko-toko *Fair Trade* menyebar keseluruh Eropa.

⁷ Savio W. 2003. *Fair Trade sebuah Alternatif positif*. Surakarta. Yayasan Samadi. hal: 115.

Pada musim gugur 1986, oleh NGO di Belanda melakukan kampanye nasional, dan kelompok tersebut kemudian memperkenalkan label Max Havelaar yang membangun ukuran-ukuran bagi perdagangan kopi: ia memberikan jaminan “*fair price*” minimal.

Pada tahun 1989 *International Federation for Alternative Trade* (IFAT) didirikan berasama-sama kelompok produsen dan pelaksana-pelaksana *Fair Trade* lainnya dari Eropa, Asia, Amerika, Australia dan Jepang. IFAT mempunyai tujuan ganda yaitu meningkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan komunitas marjinal di negara-negara yang sedang berkembang dan mengubah struktur perdagangan internasional yang tidak adil⁸.

Hingga kini sudah ada 20 negara yang berafiliasi dengan FLO. Selain itu, tercatat 1.500 produk dari 55 negara di dunia telah mendapat sertifikasi *fair trade*. Diperkirakan, sebanyak 1,5 juta petani mendapat keuntungan langsung dari sertifikasi ini dan 7,5 juta keluarga memperoleh keuntungan secara tidak langsung. Di Indonesia sendiri tercatat ada 40 organisasi yang memiliki hubungan dengan FLO per Juni 2008. Sepuluh di antaranya telah memegang sertifikat FLO sedangkan 30 lainnya dalam proses pengajuan⁹.

⁸ Savio W. 2003. *Fair Trade sebuah Alternatif positif*. Surakarta. Yayasan Samadi. hal: 119-129.

⁹ <http://www.inilah.com/rubrik/citizen-journalism>

b. Tujuan *Fair Trade*

- Meningkatkan kesejahteraan hidup para produsen kecil dan menengah dengan cara meningkatkan akses pasar produk-produk mereka; memperkuat organisasi-organisasi produsen; memberikan pelayanan yang lebih baik; dan menyediakan kontrak jangka panjang dalam hubungan perdagangan.
- Mempromosikan manfaat-manfaat pembangunan para produsen yang kurang beruntung terutama kaum perempuan dan masyarakat adat, dan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak dari eksploitasi dalam proses produksi.
- Membangun model kemitraan dalam perdagangan melalui prinsip-prinsip dialog, transparansi, dan penghargaan.
- Mengkampanyekan perubahan-perubahan dalam tata aturan dan praktek perdagangan internasional yang konvensional.
- Melindungi Hak Asasi Manusia dengan mempromosikan keadilan sosial, praktek-praktek yang ramah lingkungan dan ketahanan ekonomi.

c. Prinsip-Prinsip *Fair trade*

- Menciptakan lapangan kerja dan peningkatan biaya pendapatan bagi kelompok kerja.
- Menciptakan manajemen bisnis dengan mitra bisnis berdasarkan keterbukaan, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

- Mengembangkan kemandirian produsen baik dari segi *skill* dalam pengembangan produk dan design serta kemandirian dalam memperluas pasar.
- Mensosialisasikan perdagangan berwawasan keadilan.
- Melakukan pembayaran yang layak bagi produsen.
- Pengerjaan produk dilakukan di bengkel/ rumah produksi yang sehat, nyaman dan aman.
- Tidak adanya diskriminasi gender, maksudnya perlakuan yang sama antara produsen laki-laki dan produsen perempuan.
- Tidak menggunakan tenaga kerja anak dalam memproduksi barang diharapkan untuk memberikan pelatihan pada aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup.
- Profesionalisme yaitu semua pihak hendaknya bekerja sama secara professional, sepenuh hati, efektif, sistematis, dan tetap mengembangkan semangat kolektifitasnya.

Logo *fair trade*



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati orang-orang yang diteliti. (Bogdan dan Taylor)¹⁰. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku, yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau tidak. dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini¹¹.

Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain adalah alat pengumpul data utama. Segala temuan data di lapangan akan disusun menggunakan metode tertentu dan berdasarkan data yang terkumpul akan digambarkan secara deskriptif, tanpa mengurangi kevalidan yang diperoleh dalam proses analisisnya.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan mengapa metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah yang akan disusun berdasarkan pada pengalaman serta temuan lapangan ketika mahasiswa melaksanakan kegiatan *Internship* pada Yayasan Pekerti Yogyakarta.

¹⁰ Bagong S, Sutinah (ed), *Metode Penelitian Kualitatif: Berbagai alternatif pendekatan*, 2005, Kencana, Jakarta, hal 166.

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pengantar*, 2003, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal 26

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah mereka yang memiliki pengalaman langsung dengan persoalan yang diangkat penulis, yaitu staf dari Yayasan Pekerti dan perajin. Dari Yayasan Pekerti adalah Pak arif sebagai koordinator divisi pengembangan masyarakat dan advokasi, dan dari perajin diantaranya; pertama bapak bejo sebagai perajin geraba, kedua bapak Darmo, juga sebagai perajin geraba, dan ketiga ibu Darwati sebagai perajin tenun rotan.

Staf dari Yayasan Pekerti Pak Arif khususnya divisi pengembangan masyarakat dan advokasi dipilih menjadi subyek penelitian karena, divisi ini menangani atau berhubungan secara langsung dengan perajin di Kecamatan Pundong.

Sedangkan perajin diantaranya bapak Bejo, Darmo, Darwati dipilih menjadi subyek penelitian karena mereka adalah perajin yang sudah lama mengikuti program *fair trade* dan usaha mereka berkembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang dalam memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu secara tatap muka atau langsung¹².

¹² Deddy M., *Metode Penelitian Kualitatif*, 2004, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 180.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tak berstruktur sebagai cara mendapatkan data. Wawancara dipakai untuk mendapatkan data dan informasi yang pribadi dengan melakukan secara langsung dengan responden.

b. Metode Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki¹³.

Observasi dilakukan dengan cara partisipasi aktif, di mana penulis secara langsung berpartisipasi dalam kegiatan subyek penelitian melalui kegiatan *internship*. Dalam hal ini perlu diikuti relasi, interaksi dan komunikasi yang intensif antara penulis dan responden untuk meminimalisir kekeliruan pandangan antara keduanya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan secara induktif, yaitu analisis yang berpangkal dari kerangka berfikir khusus ke umum atau dengan kata lain kesimpulan umum berpangkal tolak dari menganalisa masalah yang diangkat secara mendalam. Sanapiah Faisal dalam bukunya *Format-Format Penelitian* mengemukakan beberapa langkah dalam menganalisis data yaitu:

¹³ Sutrisno H., *Metodelogi Research jilid II*, 1993, Yogyakarta. Andi. hal 136.

a. Reduksi data

Data yang telah dikelompokkan secara rinci disusun dalam bentuk uraian atau laporan. Tulisan tersebut masih berupa data mentah yang belum disusun secara sistematis. Untuk itu perlu dipilih dan dirangkum hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Sajian data

Sajian data pada dasarnya terdiri dari hasil analisis yang berupa cerita rinci pada informan yang sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka apa adanya.

c. Penyajian data penelitian dengan pendekatan kualitatif

Penyajian data penelitian dengan pendekatan kualitatif pada prinsipnya berproses secara induksi – interpretasi – konseptualisasi. Induksi adalah ketika mengumpulkan data dan menyajikan tumpukan data sebagai tahap awal, penulis akan mengutip langsung pandangan responden sesuai bahasa atau kalimat mereka. Interpretasi data dilakukan ketika penulis menemukan "benang merah" dari masalah yang diteliti. Konseptualisasi dilakukan saat penulis menarik kesimpulan dari hasil pembahasan teoritik.

5. Proses Penulisan Laporan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan terhadap fakta dan fenomena yang diteliti. Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

BAB II DESKRIPSI UMUM LEMBAGA

Bab ini berisi deskripsi lembaga yang dijadikan lokasi penelitian dan meliputi paparan umum lembaga, sejarah lembaga, dan struktur lembaga.

BAB III WUJUD IMPLEMENTASI *FAIR TRADE* DALAM PEMBERDAYAAN PENGRAJIN *HANDICRAFT* OLEH YAYASAN PEKERTI

Bab ini berisi tentang pembahasan masalah penelitian yang dianalisis menggunakan konsep atau teori yang digunakan sebagai kerangka teoritik.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan uraian singkat tentang penelitian yang telah dilakukan dan dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran atas masalah yang terjadi di lokasi penelitian.